



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
DALAM PENGUJIAN MATERIIL
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 7 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Materiil (IV)

**Selasa, 7 November 2023, Pukul 11.02 – 11.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Zen Mutowali
2. Endang Rokhani
3. Sahat Butar Butar
4. M. Fandrian Hadistianto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023:

1. Ricky Donny Lamhot Marpaung
2. Ferdy Nehemia Hamonangan
3. Michael Nainggolan
4. Samuel Rivaldo
5. Jonatan Ferdy

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Nuryani Yunus | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 4. Ernie Haris | (Kemenkumham) |
| 5. Haiyani Rumondang | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 6. Reni Sihombing | (Kementerian Sekretariat Negara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon untuk Perkara 40, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [00:16]

Izin, Yang Mulia, yang hadir dari Perkara 40, saya sendiri Kuasa Muhammad Fadrian Hadistianto, di samping kiri saya ada Sahat Butar-Butar, samping kanan saya Kuasa Pak Zen Mutawali, samping kanannya Mbak Endang, Ibu Endang Rohani, Kuasa. Berikutnya di belakang Yang Mulia ada Ibu Mustiyah, Kuasa, samping kanan Ibu Mustiyah ada M. Yusuf, Muhammad Yusuf, setelah itu ada Pak Ari Lazuardi, habis itu ada Pak Guntoro, dan samping kanannya itu ada dari Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Oke, terima kasih. Untuk Perkara 61, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXI/2023: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [01:01]

Izin, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Ricky Donny Lamhot Marpaung, Kuasa Hukum Prinsipal dari Leonardo Halomon Siahaan, di samping saya ada Ferdy, Karel, Michael, dan di belakang ada Samuel. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Terima kasih. Dari Kuasa Presiden, siapa yang hadir? Silakan.

6. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [01:24]

Izin, Yang Mulia, yang hadir kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ibu Reni Mursidayanti. Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak I Ketut Hadi

Priatna. Dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bapak Andrie Amoes, dan Ibu Ernie Haris. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita, sebagaimana dinyatakan pada sidang sebelumnya adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Dan DPR berhalangan hadir, sementara Presiden mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk Perkara 40 dan 61. Silakan disampaikan. Apa substansi suratnya ini?

8. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [02:23]

Izin, Yang Mulia, Ketua Majelis Konstitusi. Yang pertama, untuk Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, sebagaimana surat yang disampaikan dan ditandatangani oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tertanggal 6 November tahun 2023, memohon kiranya Ketua ... Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan perpanjangan waktu untuk menyusun Keterangan Presiden.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Oke.

10. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [03:07]

Dan menunda persidangan dimaksud, sehingga kami dapat menyampaikan pada persidangan berikutnya.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Oke, terima kasih. Jadi intinya, ini, ya, Pemohon, ya, kedua Pemohon, Pemerintah mengajukan permohonan agar ada penundaan karena mereka masih mempersiapkan. Nah, kami sampaikan, ya, kepada Pemerintah atau Kuasa Presiden, untuk sidang berikutnya itu harus segera disiapkan. Jadi tidak ada lagi alasan ini belum siap dan segala macamnya. Kan kita juga harus menghargai kepentingan Pemohon, ya. Itu tolong dicatat dengan baik. Pemohon bisa dipahami, ya, itu alasannya.

Dan sebelum sidang ini ditutup, kami akan menyampaikan.

Satu. Pertama, pernyataan maaf dari Mahkamah karena sidang ini tertunda dilaksanakan dari mestinya pukul 10.00, masuk ruang sidang hampir pukul 11.00 karena tadi kami menyelesaikan beberapa RPH berkait dengan laporan Panel dan segala macam yang tidak bisa ditunda.

Dan kedua, sidang untuk Perkara 60 ... 40 dan 61 Tahun 2023 ditunda pada hari Rabu, 22 November 2023 pada pukul 11.00 WIB. Agendanya adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Ya, kuasa Presiden, ya, bisa dicatat dengan baik, Pemohon, ya, oke terimakasih.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [04:38]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Ada? Cukup paham, ya? Oke, terima kasih.

Oke. Dengan demikian, sidang ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 7 November 2023
Panitera,
Muhidin

